

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era digital saat ini, berbagai bidang kehidupan masyarakat telah berubah dan kini tak terpisahkan dari penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah digunakan untuk mempermudah hampir semua aspek pekerjaan masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat bertransaksi. Akses masyarakat terhadap teknologi juga mendorong pertumbuhan mekanisme pembayaran yang tadinya hanya menggunakan uang tunai menjadi nontunai. Kepraktisan sangat penting dalam hal metode pembayaran karena hal tersebut salah satu ciri budaya kontemporer (Sari, 2019).

Salah satu jenis revolusi 4.0 yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang adalah digitalisasi, yang menggunakan teknologi digital berupa internet dalam teknologi informasi dan komunikasi. Gelombang digitalisasi yang terjadi pada satu dekade terakhir, intervensinya dalam kehidupan masyarakat memiliki dampak besar pada bagaimana mereka berperilaku. Keinginan untuk melakukan pembayaran serba *mobile*, cepat serta aman menjadi tuntutan akibat pola konsumsi masyarakat yang mulai bergeser. *Smartphone* kini menjadi bagian dari rutinitas harian hampir setiap orang. Oleh karena itu, *smartphone* menjadi media utama alat pembayaran.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), berusaha untuk menyediakan mekanisme pembayaran yang aman dan efektif, dan tanpa hambatan, secara resmi diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 14 Agustus 2014, sebagai bentuk dukungan terhadap hal ini. Selain meningkatkan efisiensi transaksi, GNNT juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan perhitungan dan *human error*, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai. Hal ini sekaligus dimanfaatkan untuk mewujudkan ekosistem *less cash society* (Bank Indonesia, 2020a).

Saat ini, metode pembayaran tanpa uang tunai berbasis digital adalah jenis pembayaran yang sangat populer. Selain kemajuan teknologi yang semakin pesat, keadaan pandemi corona yang menghantui bumi pada beberapa tahun lalu juga turut andil dalam perubahan perilaku yang berujung pada digitalisasi. Khususnya pada awal masa Covid-19, ketika opsi pembayaran digital sedang digalakkan untuk mengurangi penyebaran virus melalui perputaran uang (pembayaran tunai) (Faizani & Indriyanti, 2021). Hal tersebut menyebabkan sektor ekonomi harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Pembayaran nontunai menawarkan keuntungan berupa pembayaran sederhana, efisien, dan lebih aman apabila dilakukan perbandingan menggunakan uang tunai, serta dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di suatu negara. Uang tunai dengan jumlah banyak sudah tidak harus dibawa oleh konsumen karena mereka dapat membayar menggunakan *scan QR* di lokasi-lokasi yang disediakan oleh *merchant*. Produsen tidak perlu menyediakan uang kertas kecil untuk kembalian, sehingga lebih nyaman bagi konsumen. Selain itu, BI dapat menurunkan biaya produksi uang tunai yang tinggi jika pembayaran nontunai terus berkembang di masyarakat (Hidayah & Mufidati, 2021). Setidaknya Rp3,5 triliun harus dialokasikan setiap tahun untuk biaya pencetakan dan pendistribusian uang kartal di seluruh Indonesia (detikFinance, 2015).

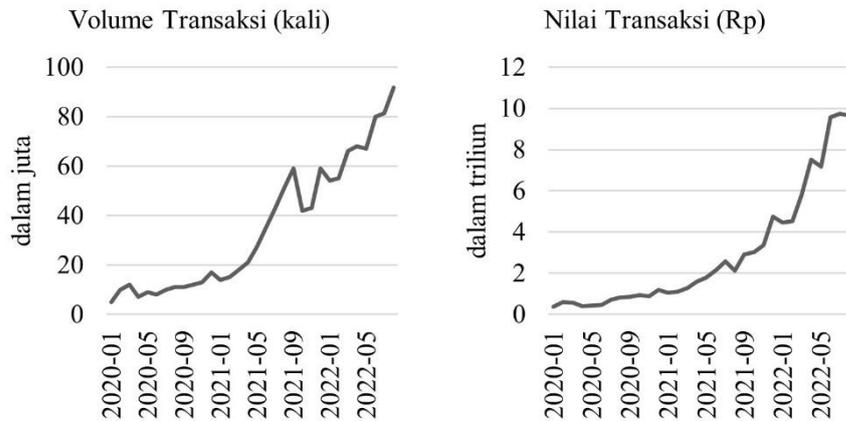
Meski begitu, transaksi nontunai bukanlah pengganti sistem pembayaran tunai, melainkan keduanya saling melengkapi. *E-wallet* dan *e-money* adalah dua jenis metode pembayaran nontunai. *E-wallet*, yang juga dikenal sebagai dompet digital adalah metode pembayaran berbasis *server (card less)*, sedangkan *e-money*, yang juga dikenal sebagai uang elektronik adalah mekanisme pembayaran berbasis *chip (card based)* (Silaen et al., 2021). Pemain lokal menguasai mayoritas *e-wallet* di Indonesia. Dalam kurun waktu antara Q2 2019-Q2 2020, empat dompet elektronik dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbesar adalah Go-Pay, OVO, Dana, dan LinkAja (Devita, 2020). Dalam rangka mendukung pembayaran digital, BI merilis QRIS sebagai standar QR

code nasional. Hal ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah pengguna *e-wallet* di Indonesia.

Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah modifikasi sistem pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dalam kapasitasnya sebagai regulator dan Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI). QRIS merupakan turunan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 untuk mengatasi tantangan terkait permasalahan interkoneksi di sistem pembayaran Indonesia. Dengan QRIS, regulator dapat mengawasi sistem pembayaran yang lebih simpel dari satu pintu. Menurunnya penggunaan uang tunai di masyarakat dan fakta bahwa Indonesia telah memiliki 38 *e-wallet* berlisensi penuh menyoroti meningkatnya kebutuhan akan satu QR *code* nasional.

Semua penyedia layanan pembayaran nontunai mulai menggunakan QRIS pada tanggal 1 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan BI, untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi inklusi keuangan, mengembangkan UMKM, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020). Selain memperluas pembayaran nontunai di seluruh negeri secara lebih efisien, QRIS memungkinkan ekosistem digital (*e-commerce, fintech, bank*) untuk saling terhubung dengan lebih baik (Puspitasari & Salehudin, 2022).

Menurut data ASPI, tren penggunaan QRIS menunjukkan peningkatan signifikan pada Agustus 2022 dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Terdapat 91,7 juta transaksi QRIS hingga Agustus 2022, senilai total Rp9,66 triliun (Gambar 1.1). Jika dibandingkan dengan awal tahun 2020, ketika jumlah transaksi QRIS baru mencapai 5 juta kali dengan total nilai transaksi sebesar Rp365 miliar, jumlah ini tumbuh signifikan. Menurut Gubernur BI, pada Agustus 2022 telah ada sekitar 20 juta *merchant* QRIS yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan 90% dari jumlah tersebut (Ahdiat, 2022c).



Gambar 1.1 Volume dan Nilai Transaksi QRIS di Indonesia (Januari 2020- Agustus 2022)

Sumber: Databoks, data diolah (2023)

Menurut BI, per Desember 2022, terdapat 28,75 juta pengguna QRIS di Indonesia (Tabel 1.1). Jumlah itu meningkat 15,95 juta pengguna sejak akhir tahun lalu. Dari total keseluruhan pengguna QRIS, Pulau Jawa menduduki posisi pertama dengan mayoritas pengguna QRIS sejumlah 20,59 juta. Sumatera berada di urutan kedua dengan 4,75 juta pengguna QRIS. Posisi ketiga ditempati Kalimantan dengan 1,25 juta pengguna. Adapun jumlah pengguna QRIS di Sulawesi, Maluku, dan Papua tercatat sejumlah 1,18 juta. Sementara itu, Nusa Tenggara dan Bali memiliki pengguna QRIS paling sedikit. Hingga akhir tahun lalu, jumlah penggunanya mencapai 979.788 (Mustajab, 2023).

Tabel 1.1 Sebaran Pengguna QRIS di Indonesia (per Desember 2022)

No	Kawasan	Jumlah Pengguna QRIS
1	Jawa	20.590.488
2	Sumatera	4.755.340
3	Kalimantan	1.253.849
4	Sulawesi - Maluku - Papua	1.176.139
5	Bali - Nusa Tenggara	979.788

Sumber: DataIndonesia.id, data diolah (2023)

Selanjutnya, BI menyatakan jumlah *merchant* QRIS meningkat menjadi 24,9 juta pada Februari 2023, dengan total pengguna QRIS sebanyak 30,87 juta. Selain itu, tercatat nominal transaksi QRIS hingga Februari 2023 sebesar Rp 12,28 triliun dengan volume transaksi 121,8 juta (Bank Indonesia, 2023). Para

pelaku UMKM mulai menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk usaha mereka sebagai hasil dari tingginya pengguna *cashless payment* di Indonesia. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus menerapkan proses pembayaran yang transparan dan mudah. Di Indonesia, pembayaran digital secara aktif didorong untuk meringankan biaya produksi uang kertas. Indonesia jelas jauh tertinggal dari China yang hampir setengah dari populasi mereka telah mengadopsi *cashless payment* (Suryanto et al., 2022).

Minat yang tinggi terhadap *less cash society* juga ditunjang dengan adanya promo *merchant*. Penjual barang dan jasa yang bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran uang elektronik bank yang berlaku dan memiliki bentuk usaha tertentu dikenal sebagai *merchant*. Jumlah pedagang (*merchant*) di Ibu Kota yang melayani transaksi lewat QRIS terus meningkat. Berdasarkan laporan BI, pada awal pandemi kuartal I 2020 baru ada sekitar 672 ribu *merchant* QRIS di Ibu Kota (Tabel 1.2). Namun setelahnya jumlah *merchant* mengalami kenaikan sekitar lima kali lipat jadi 3,69 juta *merchant* pada kuartal II 2022 (Ahdiat, 2022b). Berdasarkan wilayahnya, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki jumlah *merchant* QRIS terbanyak, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengalami peningkatan paling banyak, dengan tambahan 110,4 ribu *merchant* (Bank Indonesia, 2022b).

Tabel 1.2 Jumlah Merchant QRIS di DKI Jakarta (Q1 2020-Q2 2022)

No	Periode	Jumlah Merchant QRIS di DKI Jakarta
1	q1 2020	672.584
2	q2 2020	744.570
3	q3 2020	876.811
4	q4 2020	1.034.684
5	q1 2021	1.169.024
6	q2 2021	1.299.948
7	q3 2021	1.638.197
8	q4 2021	3.161.984
9	q1 2022	3.421.386
10	q2 2022	3.692.279

Sumber: Databoks, data diolah (2023)

Dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang krusial. Karena membutuhkan banyak usaha dan dilakukan sesuai dengan bakat masyarakat, UMKM mencerminkan dan merepresentasikan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat setempat dan merupakan pencipta lapangan kerja yang lebih potensial. UMKM sebagai kekuatan utama di balik finansial pedesaan dan inti penciptaan lapangan kerja di Indonesia, yang banyak berkontribusi pada permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2012, terdapat 56 juta pemilik usaha di Indonesia, 99,99% di antaranya adalah UMKM dan 0,01% adalah usaha besar (Bank Indonesia, 2016).

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa ada lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan UMKM terbanyak di kawasan ASEAN pada 2021. Laporan tersebut dirilis pada September 2022 oleh *ASEAN Investment Report*. Meskipun kinerjanya masih lebih rendah dibandingkan dengan Myanmar, dimana UMKM-nya mampu berkontribusi hingga 69,3% terhadap PDB setempat. UMKM Indonesia dilaporkan telah mampu mempekerjakan 97% tenaga kerja berkontribusi 60,3% terhadap PDB, dan menghasilkan 14,4% terhadap ekspor nasional. Rencana digitalisasi adalah salah satu cara yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional (Ahdiat, 2022a).

Tabel 1.3 Jumlah UMKM di Negara ASEAN (2021)

No	Nama Negara	Nilai/Unit Usaha
1	Indonesia	65.465.500
2	Thailand	3.134.400
3	Malaysia	1.226.000
4	Filipina	996.700
5	Vietnam	651.100
6	Kamboja	512.900
7	Singapura	279.000
8	Laos	133.700
9	Myanmar	72.700

Sumber: Databoks, data diolah (2023)

Hanya 17,25 juta UMKM, atau sekitar 26,5% dari total lebih dari 65 juta UMKM, yang terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Angka ini menunjukkan perlunya pertumbuhan seiring dengan meningkatnya akseptasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan pembelian secara *online* (Bank Indonesia, 2022a). Sangat penting bahwa UMKM menjalani transformasi digital. Hal ini tentunya membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya.

UMKM yang berkembang membutuhkan kerja sama yang sungguh-sungguh antara dunia usaha dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun pengembangan UMKM bukan tanggung jawab utama bank sentral, keterlibatannya diperlukan baik dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter dan perbankan. Bersama pemerintah dan instansi terkait lainnya, Bank Indonesia memiliki peran dan pengalaman yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pada pelaksanaannya, BI membantu peranan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dalam mendukung pengembangan UMKM, salah satunya KPwBI Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan studi pendahuluan oleh peneliti, KPwBI Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik jika dibandingkan dengan KPwBI daerah lain. KPwBI Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sembilan pencapaian yang diraih dalam tingkat nasional sepanjang tahun 2022. Di antara pencapaian tersebut terdapat empat capaian dalam kategori pengembangan UMKM, yaitu akuisisi *merchant QRIS* tertinggi se-nasional per 16 Desember 2022, apresiasi oleh Kemendag atas partisipasi UMKM KPwBI Provinsi DKI Jakarta dalam *Trade Expo Indonesia 2022 (furniture and home décor)*, KPw dengan program pengembangan UMKM terintegrasi, inovatif, dan berkualitas, serta apresiasi oleh Bukalapak atas peningkatan kapasitas UMKM *Go Digital*.

KPwBI Provinsi DKI Jakarta rutin membagikan dokumentasi kegiatan sosialnya di sosial media Instagram milik kantor yang terletak di kawasan Senen, Jakarta Pusat tersebut. KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga kerap kali membagikan kembali unggahan Bank Indonesia, di antaranya Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan, peringatan Hari Besar Agama, dan lainnya terkait perekonomian Indonesia. Tidak hanya tentang perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi regional pun dapat kita temui pada sosial media KPwBI Provinsi DKI Jakarta.

Perkembangan ekonomi ke depan baik di tingkat regional, pemerintahan, maupun internasional akan terus dicermati oleh Bank Indonesia Jakarta. Dalam rangka mendorong momentum percepatan pemulihan ekonomi DKI Jakarta di berbagai sektor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bank Indonesia

Jakarta juga terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Segala bentuk dokumentasi yang dilakukan bertujuan agar masyarakat luas jauh lebih paham dan mengerti tentang kebijakan, program atau hal-hal lain terkait Bank Indonesia khususnya KPwBI Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya dan fenomena perkembangan pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran di UMKM Indonesia, peneliti menyadari bahwa kesadaran masyarakat dan *merchant* mengenai transaksi nontunai melalui QRIS masih cukup minim, terutama informasi seputar akuisisi *merchant* QRIS di setiap daerah dilakukan oleh KPwBI yang berbeda.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Putri (2023), yang menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi BI dalam mengimplementasikan strategi QRIS adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan *merchant* terhadap transaksi nontunai melalui QRIS. Penelitian ini juga didukung oleh Nasrida & Nanda (2023), Hidayah & Mufidati (2021), Meliyanti (2021), dan Sekarsari (2021).

Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Rifani (2023), yang menemukan bahwa pelaku UMKM di Kota Parepare telah mengenal QRIS sebagai sistem pembayaran digital dari BI. Sementara itu, menurut penelitian Sihaloho (2020), sistem pembayaran nontunai melalui QRIS membantu UMKM dalam mencatat transaksi pendapatan harian dan memastikan keamanan pendapatan, sehingga meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dan ekonomi digital Indonesia.

Terlepas dari kemudahan penggunaan dan efisiensinya, berdasarkan temuan wawancara dan observasi diketahui bahwa UMKM pengguna QRIS di Jakarta ternyata masih memiliki kendala seperti biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) per transaksi yang berdampak signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM dan preferensi konsumen yang tidak selalu memilih pembayaran nontunai melalui QRIS. Masalah besaran MDR juga konsisten dengan temuan Rifani (2023), Azhari (2021), dan Sihaloho (2020).

Penelitian ini menemukan bahwa KPwBI Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam melaksanakan strategi QRIS tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat dan *merchant* terhadap transaksi nontunai dan keterikatan masyarakat yang kuat terhadap transaksi tunai, yang sejalan dengan penelitian Putri (2023). KPwBI Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa mereka menerima bantuan penuh dari bank daerah dan PJSP untuk edukasi dan sosialisasi QRIS, yang bertentangan dengan temuan penelitian Nasrida & Nanda (2023). Menurut penelitian tersebut, terdapat lebih sedikit bantuan dari bank dan penyedia layanan pembayaran digital di Kota Palangka Raya.

Kesenjangan antara temuan studi ini (*research gap*) menunjukkan bahwa bidang ini membutuhkan lebih banyak penelitian. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai strategi, kendala, dan dampak dari strategi QRIS dalam upaya pengembangan pembayaran nontunai pada UMKM. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Strategi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Upaya Pengembangan Pembayaran Nontunai Pada UMKM (Studi Pada KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta)" agar yang membacanya dapat lebih memahami strategi QRIS dalam upaya pengembangan pembayaran nontunai pada UMKM di Jakarta.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus ini bertujuan untuk pembatasan penelitian dengan memungkinkan peneliti untuk mengambil dan memilah data yang sejalan. Menurut Sidiq & Choiri (2019), hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan rekomendasi dari pembimbing atau orang yang dianggap ahli semuanya memiliki peran dalam menentukan fokus penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada "*Analisis Strategi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Upaya Pengembangan Pembayaran Nontunai Pada UMKM (Studi Pada KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta)*" yang objek utamanya merupakan KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan yang hendak dicari jawaban dengan kajian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Bagaimana strategi KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta?
2. Bagaimana dampak strategi KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan strategi KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini tercantum di bawah ini, sesuai dengan fokus penelitian yang disebutkan di atas.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak strategi KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melakukan strategi KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan temuan penelitian ini dapat berguna atau memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sesuai dengan tujuannya.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk melakukan perkembangan pengetahuan, utamanya terkait strategi, dampak, dan kendala yang dihadapi oleh KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta.
- b. Untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti dan mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta.
- c. Mengenai tujuan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman intelektual di bidang kewirausahaan dan berfungsi sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya yang berencana untuk melakukan penelitian yang lebih luas tentang masalah yang sama di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Kontribusi terhadap perluasan khazanah perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

